

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sendiri memiliki kerangka-kerangka sebagai pendukung aktivitas pemerintahannya yaitu provinsi, kabupaten/Kota, kecamatan, dan sampai pada kerangka terkecil. Kerangka-kerangka tersebut diberikan hak otonomi daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Otonomi daerah yang dimana membuka gerbang kesempatan bagi dunia luar dari *local government to local government*, sampai *person to person* untuk berinteraksi dan berkerjasama secara langsung (Frianto, 2021). Hal ini tertuang dalam pasal 18 UUD 1945 yang berisikan tentang kerangka-kerangka negara Indonesia beserta fungsi dan haknya. Hal ini sebenarnya mengacu pada perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang semula sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Sistem pemerintahan sentralisasi Indonesia dimulai pada masa Orde Baru pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Setelah Presiden Soeharto mundur pada tahun 1988 dan Orde Baru runtuh, muncullah pandangan-pandangan yang berisikan perubahan pemerintahan Indonesia yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Sentralisasi dan desentralisasi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Salah satu kelemahan dari sentralisasi adalah keterlambatan dalam mengambil keputusan terutama untuk wilayah terpencil, tidak meratanya

pembangunan dan hanya fokus terhadap pemerintahan pusat saja,tidak menumbuhkan kreatifitas sumber daya manusia karena fokus hanya di pusat saja.Kelebihan dari sentralisasi adalah pemerataan hukum dan peraturan di semua daerah,dan juga anggaran yang dikeluarkan lebih sedikit sehingga menghemat biaya (Welianto, 2020). Kemudian desentralisasi sendiri memiliki sistem pemerintahan yang cukup kompleks sehingga sering terjadi miskomunikasi ataupun kesalahan koordinasi. Dalam membuat suatu keputusan juga dinilai berbelit dikarenakan banyaknya pejabat daerah yang terbentuk. Anggaran yang dikeluarkan juga menjadi lebih banyak daripada desentralisasi. Kelebihan Desentralisasi ialah sistem pemerintahan yang lebih fleksibel sehingga lebih cepat merespon. Adanya desentralisasi menjadikan adanya pengembangan sumber daya manusia yang lebih kreatif (CaesarIsabella, 2022).

Diplomasi merupakan suatu strategi pendekatan yang digunakan untuk menjalin antar entitas dalam sistem internasional. Diplomasi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh pihak-pihak terkait dalam diplomasi tersebut.Dampak diterapkannya diplomasi itu adalah adanya hubungan kerjasama diberbagai bidang (Setiaan, 2016) Diplomasi merupakan suatu strategi pendekatan yang digunakan untuk menjalin kerjasama antar entitas dalam system internasional. Diplomasi berkedudukan strategis sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan diplomasi tersebut. Dampak diterapkannya suatu diplomasi yaitu adanya suatu hubungan kerjasama diberbagai bidang (Setiawan, 2016).

Desentralisasi adalah sebuah konsep yang menjelaskan penyerahan adanya hak otonom atau sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Adapun tujuan desentralisasi adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal
2. Mendorong demokratisasi dan akuntabilitas pemerintah, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pembangunan di daerah mereka
3. Mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antara pusat dan daerah
4. Mempertahankan integritas dan kesatuan nasional, dengan menghormati keragaman dan kekhasan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi politik pada dasarnya adalah pemberian kewenangan kepada pmda untuk menjalankan suatu kebijakan. Kemudian ada juga yang disebut dengan desentralisasi managerial atau administrasi adalah desentralisasi yang memberikan petunjuk bagaimana implementasi dan kewenangan tersebut (Prayudi, 2014). Politik Desentralisasi di Indonesia sebetulnya sudah ada pada masa kerajaan dahulu. Politik Desentralisasi dapat ditemukan pada hubungan antara raja dengan para bupati (Sadu Wasistiono, 2017).

Kota Batam adalah salah satu Kota penting di Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan letaknya yang langsung berbatasan dengan negara tetangga yaitu dan Singapura dan Malaysia dan juga berada dengan jalur pelayaran internasional. Kota Batam memiliki geografis yang sangat menguntungkan karena berada di alur perdagangan Internasional yang berbatasan langsung dengan Singapura. Kota Batam sendiri memiliki luas wilayah secara keseluruhan yaitu 1575 km². Dengan luas daratan 715 km². Suhu rata-rata Kota Batam adalah 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kota Batam memiliki daratan yang berbukit-bukit dengan tanah merah yang kualitas tanahnya kurang subur sehingga kurang cocok dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Dalam sejarah, munculnya *Sister City* dimulai dilegalakan pada tahun 1950-an dengan dukungan oleh Presiden Amerika Serikat Eisenhower. Pada awalnya, *Sister City* berawal dari adanya *Municipal International Cooperation* (MIC) yang adalah relasi kerjasama antara dua atau lebih instansi terstruktur seperti pemerintahan daerah, Kota, provinsi, dan negara bagian. Kemudian konsep *Sister City* banyak ditiru dan dipraktikkan oleh negara lain. *Sister City* ini juga sangat terkait dengan dengan konsep desentralisasi yang dimana daerah-daerah memiliki hak otonom untuk mengatur wilayahnya. Dengan adanya konsep Desentralisasi, daerah-daerah bisa melakukan kebijakan-kebijakan untuk wilayahnya tanpa harus melalui persetujuan pemerintahan pusat. Adanya Desentralisasi, maka setiap daerah khususnya berperan dalam aktivitas internasional bisa melakukan kebijakan *Sister City* sebagai kebijakannya. Dalam prakteknya juga dimulai dengan cara yang berbeda-beda, seperti adanya komunitas masyarakat yang berinisiatif untuk membentuk Kota

kembar melalui pengajuan ke kepala pemerintahan daerah. Ada juga dengan niat sama-sama mencari keuntungan di bidang perekonomian. Ada juga kedua Kota memiliki historis budaya yang mirip atau sama dan adanya menyelenggarakan festival-festival kebudayaan. Faktor-faktor di atas telah menunjukkan bahwa jika ada kesamaan dalam bidang tertentu diantara kedua Kota maka akan sangat mudah timbulnya inisiatif untuk menjalin hubungan kerjasama *Sister City* antara kedua Kota.

Kota Batam juga merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun yang menawarkan bisnis dan investasi. Kota Batam juga menjadi salah satu daerah FTZ di Indonesia bersama dengan Aceh dan Karimun. Sejarah Kota Batam sendiri dimulai sejak abad ke 3 Masehi. Ketika pulau ini dihuni oleh penduduk Melayu. Pada dekade 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai mencoba mengembangkan Kota Batam dengan membentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Tahun 1983, Batam resmi menjadi sebuah Kotamadya yang memiliki tugas menjalankan administrasi pemerintahan.

Pengalaman Kota Batam di dunia internasional juga sudah banyak. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi, Kota Batam menjadi salah satu kawasan dagang yang ramai di Indonesia dan mampu menarik investor asing dengan segala kelebihannya. Kota ini juga memiliki hubungan dagang yang erat dengan Singapura dan Malaysia, dan juga sebagai Kota dengan industri manufaktur, perkapalan, dan pariwisata. Dalam bidang politik, Kota Batam adalah Kota yang aktif dalam urusan

diplomasi internasional. Kota Batam pernah menjadi tuan rumah sebagai pertemuan IMT-GT ke 29 dan pertemuan g20. Kota ini juga menjadi salah satu Kota yang mendukung kiprah Indonesia dalam memperkuat perdamaian di kancah internasional.

Kota Gimje adalah Kota yang berasal dari Korea Selatan dan memiliki keunggulan dalam pertanian. Kota ini memiliki luas 545,9 km² dan memiliki populasi masyarakatnya sebanyak 85.924 Jiwa di tahun 2019. Kota Gimje sendiri memiliki festival khasnya yaitu festival cakrawala atau disebut jipyeongseon (Soo, 2007). Festival ini menyelenggarakan berbagai pertunjukan dan pameran seperti gulat, parade jalanan, kontes menggambar dan juga para wisatawan berkesempatan untuk bisa menikmati pengalaman memanen secara tradisional di festival ini. Dari festival ini, Kota gimje bisa dikunjungi oleh lebih dari satu juta wisatawan di setiap tahunnya.

Batam dan Gimje memiliki sejarah berbeda yang membentuk perkembangan mereka selama bertahun-tahun. Batam, yang terletak di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, telah berubah dari desa nelayan kecil menjadi Kota industri yang berkembang pesat. Pertumbuhan Batam tidak lepas dari letaknya yang strategis sebagai kawasan perdagangan bebas dan kedekatannya dengan Singapura. Hal ini menyebabkan berdirinya banyak industri manufaktur dan menarik investasi asing, sehingga mengakibatkan pembangunan perKotaan dan pertumbuhan penduduk. Gimje, di sisi lain, adalah sebuah Kota di provinsi Jeollabuk-do, Korea Selatan. Signifikansi historisnya terletak pada warisan pertaniannya, khususnya pertanian padi, yang dulu dikenal sebagai lumbung padi Korea. Namun, dengan modernisasi

dan perubahan praktik pertanian, Gimje telah mendiversifikasi perekonomiannya dan kini mencakup sektor-sektor seperti pariwisata dan energi terbarukan. Lintasan sejarah Batam dan Gimje menyoroti perbedaan jalur pembangunan dan tantangan unik yang mereka hadapi dalam beradaptasi terhadap perubahan lanskap ekonomi.

Sister City atau Kota kembar dan juga diucapkan sebagai *twin city* adalah bentuk kerjasama antar dua Kota yang berada di wilayah negara yang berbeda. Tujuan Kerjasama ini dikategorikan sebagai kerjasama bilateral dikarenakan melibatkan dua negara walaupun yang berperan adalah Kota dalam bagian masing-masing negara yang terlibat. Tujuan kerjasama ini bermacam-macam mulai dari aspek pendidikan, pariwisata, ekonomi, *agriculture*, dan sebagainya (Syamsudinnor, 2019). *Sister City* sebenarnya sudah ada dan pertama kali digunakan di Kota Keighley, Inggris dengan Kota Poix du Nord. Dalam perkembangannya, konsep *Sister City* mulai dipakai di negara dan benua lain dan memiliki dua penamaan. Istilah *Sister City* umumnya digunakan di Amerika Serikat sedangkan istilah *twin city* biasanya digunakan di benua Eropa (Bagian kerjasama Kota Bandung, n.d.).

Adapun beberapa langkah untuk menjalin hubungan kerjasama *Sister City* adalah (Mukhti, 2013):

1. Perencanaan.

Dalam tahap ini akan ditentukan daerah mana saja yang berpotensi untuk menjalin hubungan kerjasama *Sister City* beserta dengan bidang apa yang berpotensi dan perlu disepakati.

2. Penyusunan MoU (*Memorandum of Understanding*).

Dalam tahap ini biasanya didiskusikan materi secara bersama kesepakatan apa yang akan dituang dalam *draft* MoU tersebut

3. Pengajuan.

Pengajuan tersebut ditujukan kepada kementerian dalam Negeri oleh pihak Pemda maupun pihak mitra dengan disertakan draft MoU yang telah disusun.

4. Pengajuan ke DPRD.

Pengajuan lainnya dilakukan dengan pembahasan yang lebih detail terkait kerjasama di tingkat DPRD dan meminta persetujuan DPRD.

5. Penandatanganan.

Tahap ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD atas usulan kerjasama *Sister City* tersebut.

Adapun beberapa manfaat yang di dapat dari jalinan *Sister City* bagi kedua pihak antara lain (Bagus Sigit Sunarko, 2017):

1. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah meningkat
2. Adanya wadah untuk saling bertukar informasi dan ilmu pengetahuan terkait bidang-bidang yang tertuang dalam perjanjian kerjasama
3. Bukan hanya Pemerintahan Daerah yang berperan, namun juga masyarakat dan pihak swasta turut mengambil peran aktif.
4. Pengoptimalan manajemen potensi daerah
5. Memperkuat tali persahabatan antara dua Kota

6. Adanya wadah untuk saling bertukar kebudayaan dalam rangka pelestarian kebudayaan daerah.

Indonesia sendiri sudah sering menerapkan kerjasama *Sister City* kedalam pemerintahannya. *Sister City* sendiri dimuat pada surat edaran Menteri Dalam Negeri No.193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal pembentukan hubungan kerjasama antar Kota atau biasa disebut dengan *Sister City* dan pemebentukan hubungan kerjasama antar Provinsi atau biasa disebut dengan *Sister Province* baik di dalam maupun di luar negeri. *Sister City* di Indonesia dilakukan dengan mengikuti pedoman Peraturan dalam Negeri nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Tercatat kerjasama *Sister City* paling awal di Indonesia adalah kerjasama antara Kota Bandung dengan Kota Braunchwieg, Jerman pada 2 Juni 1960 (Mukti, 2020).

Kota Batam sendiri sebenarnya sudah menjalin kerjasama *Sister City* dengan Kota Shen Zen. Kerja sama ini dinilai sebagai langkah yang bagus dikarenakan kedua Kota tersebut adalah Kota industri. Namun mengikuti perkembangan dari kerjasama tersebut, Kota Batam tidak mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut dikarenakan Kota Batam mengalami inflasi besar-besaran. Kota Batam juga gagal mendapatkan keuntungan karena kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang dimiliki, dinilai gagal mendapatkan investor. Hal ini disebabkan sulitnya sistem birokrasi sehingga membuat para investor rugi dalam membangun usahanya di Batam. Kota Shen Zen diuntungkan dalam kerjasama tersebut. Mereka berhasil belajar

dari Kota Batam dan mendapatkan penghasilan US\$114,5 miliar dan memiliki pendapatan per kapita US\$ 13,200 pada tahun 2012. Hal itu tentu membuat Kota Batam menjadi dilema, namun hal itu tidak menutup kemungkinan Kota Batam untuk menjalin kerjasama *Sister City* dengan Kota lain karena Indonesia memiliki banyak hubungan diplomatik dengan negara-negara diseluruh dunia. Perwakilan dari Kota Gimje Seo Sung Heo datang ke Kota Batam pada bulan Agustus 2011 dan menjadi awal mula keseriusan kerjasama antara kedua Kota tersebut. Kerjasama tersebut disepakati dalam LoI (Letter of Intent) pada tanggal 28 September 2011. Isi dari kesepakatan tersebut berupa kerjasama di bidang Pariwisata, Pertanian, Pengembangan Industri, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Kemudian kerjasama tersebut disepakati dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) pada tanggal 17 Agustus 2013 bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia. Dari kerjasama ini, Kota Batam bisa belajar tentang sektor pertanian dari Kota Gimje (Rahmadiyahanti, 2022).

Tabel 1.1 Rekapitulasi Kesepakatan Bersama

**PERKEMBANGAN DAN REKAPTITULASI KESEPAKATAN BERSAMA (MOU)
ANTARA PEMKO BATAM DAN LUAR NEGERI s/d TAHUN 2015**

No	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PENANDA TANGANAN	JANGKA WAKTU	BERAKHIR	KETERANGAN
1.	Pemko Shenzhen-RRC	Shenzhen-RRC 18 Desember 2006	-	-	<u>Letter Of Intent</u>
2.	Pemko Gimje-Korsel	Gimje-Korsel 28 Desember 2011	-	-	<u>Letter Of Intent</u>
3.	Pemko Gimje-Korsel	Batam, 17 Agustus 2013	5 tahun	17 Agustus 2018	MoU/Memorandum Saling Pengertian

Sumber: Syamsudinoor (2019)

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat ditemukan bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimana kapasitas Paradiplomasi Kota Batam dalam menjalankan konsep *Sister City*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana paradiplomasi Kota Batam berkembang.
2. Untuk mengetahui kapasitas paradiplomasi Kota Batam dalam menjalankan konsep *Sister City*.
3. Sebagai bahan bacaan bagi para akademisi khususnya Hubungan Internasional dan juga masyarakat awam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menyajikan wawasan tentang *Sister City* bagi akademis maupun masyarakat khususnya di wilayah kepulauan Riau. Pemahaman tentang *Sister City* di kalangan masyarakat masih terdengar jarang dan kurang familier. Diharapkan dari penelitian mampu memperkenalkan peran Kota Batam di panggung internasional kepada masyarakatnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kota Batam yang  dimana telah mampu mengambil peran Internasional dengan menjalin kerjasama dengan Kota-Kota dari negara asing.
2. Sebagai batu loncatan untuk daerah lain yang dapat meniru kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Batam khususnya kebijakan terkait *Sister City*.
3. Sebagai masukan untuk Kota Batam dalam meningkatkan kebijakan *Sister City* bagi Kota Batam di masa yang akan datang. Karena mengingat adanya kerugian yang dialami Kota Batam saat menjalin kerjasama *Sister City* dengan Kota Shen Zhen.